

BAB IV
SEKURITISASI MIGRASI PEMERINTAH MESIR TERKAIT
TEROWONGAN RAFAH

Terowongan bawah tanah Rafah yang menghubungkan jalur Gaza ke Mesir di sepanjang kawasan perbatasan Rafah, telah lama menjadi jalur rahasia dan jalur ilegal “*illegal entry*” bagi para imigran Gaza untuk keluar-masuk Mesir dan Gaza. Begitupun terowongan bawah tanah Rafah ini telah lama juga menjadi jalur penyeludupan berbagai barang yang dibutuhkan Hamas ataupun penduduk Gaza di jalur Gaza. Tidak jarang senjata dan amunisi roket ikut diseludupkan melalui terowongan Rafah.

Berbagai aktifitas illegal migration, penyeludupan hingga terorisme yang muncul akibat adanya terowongan bawah tanah Rafah. Menjadi suatu kegelisahan bagi pemerintah Mesir, dimana dalam hal ini ada suatu ancaman yang merongrong keamanan migrasi Mesir. Bahkan fenomena yang ada bukan hanya menimbulkan permasalahan pada keamanan migrasi saja, namun sudah menjadi ancaman bagi keamanan negara Mesir.

Pemerintah Mesir pun melakukan berbagai tindakan dalam merespon isu permasalahan keamanan migrasi di kawasan perbatasan Rafah. Khususnya pemerintah Mesir melakukan tindakan penghancuran terhadap terowongan bawah tanah Rafah yang menjadi jalur ilegal. Semua tindakan yang dilakukan merupakan bagian dari bentuk sekuritisasi migrasi.

Oleh karena itu pada bab empat ini penulis akan memaparkan terkait analisa penghancuran terowongan Rafah sebagai bentuk dari sekuritisasi migrasi di Mesir. Dengan menggunakan teori *Securitization of Migration* dari *Philippe Bourbeau* yang memasukan indicator-indikator yang ada pada kategori institusi dan indicator-indikator yang ada pada kategori praktek keamanan.⁹⁰

A. Kategori Institusi (*Institutional Category*)

Kategori institusi ini merupakan serangkaian indikator yang menawarkan pengukuran tentang sekuritisasi migrasi secara berpasangan. Dalam hal ini memasangkan atau menghubungkan suatu hal dengan hal lainnya yang ada pada institusi pemerintahan, dan memang memiliki kesamaan atau memiliki korelasi antara satu dengan lainnya. Hukum tentang migrasi, Kebijakan Pemerintah serta peran dari beberapa lembaga yang memiliki andil dalam sekuritisasi migrasi dan saliency dari hubungan migrasi dan keamanan yang terintegrasi dalam kebijakan negara, itu semua merupakan tiga indikator pada kategori Institusi yang digunakan dalam sekuritisasi migrasi.

1. Hukum (*Legal Indicator*)

Hukum merupakan pilar yang sangat penting dalam suatu negara., karena hukum merupakan aturan atau norma yang harus dipatuhi oleh setiap orang yang berada pada negara tersebut. Ketika ada suatu hal yang tidak mengindahkan hukum yang ada sehingga menimbulkan suatu pelanggaran, maka akan ada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak yang berwenang untuk

⁹⁰ Philipe Bourbeau, *Op.Cit.* hlm. 19.

menegakan hukum tersebut. Oleh karena itu hukum menjadi indicator yang penting dalam fenomena proses sekuritisasi migrasi di Mesir.

Mesir salah satu negara yang memiliki dan memberlakukan hukum bagi semua aktor dan lembaga yang ada di dalam wilayah negara Mesir itu sendiri. Dimana hukum di Mesir menjadi pijakan bagi setiap warga negaranya yang hidup di tanah Mesir. Banyak berbagai undang-undang yang mengatur berbagai hal terkait dinamika kehidupan di negara Mesir. Salah satunya dalam fenomena yang penulis jadikan sebagai tugas skripsi yakni mengenai “Kebijakan Migrasi Pemerintah Mesir Terkait Penutupan Terowongan Rafah” bahwa Mesir memiliki hukum yang menyangkut permasalahan keimigrasian. Hukum terkait migrasi menjadi pijakan bagi setiap warga negara Mesir maupun non warga negara Mesir dalam melakukan aktifitas yang mereka lakukan menyangkut dengan aktifitas keimigrasian Mesir.

Peraturan-peraturan terkait bagaimana seseorang warga negara asing masuk ke Mesir, bagaimana warga negara Mesir pergi ke luar Mesir, apa hak yang didapatkan warga asing di dalam Mesir, apa hak yang di dapatkan warga negara Mesir di Luar negara Mesir, apa perintah dan larangan dalam migrasi Mesir, dan bentuk kegiatan migrasi seperti apa yang menimbulkan suatu pelanggaran dalam migrasi Mesir, hal-hal tersebut telah diatur dalam hukum yang menyangkut tentang ke imigrasian di Mesir. Hingga pada bentuk pidana seperti apa yang diberikan kepada warga negara asing ataupun warga negara Mesir yang melakukan pelanggaran dalam hal keimigrasian di mesir , semuanya telah diatur dalam hukum yang menyangkut tentang ke imigrasian di Mesir.

Mesir memiliki banyak hukum yang berkaitan dengan migrasi, dan hukum yang ada tidak saling berbenturan namun hukum-hukum yang ada saling menguatkan satu sama lainnya. Berikut kerangka hukum atau rujukan hukum tentang migrasi di Mesir secara umum bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1: Kerangka Hukum Migrasi Di Mesir

Kerangka Hukum / Rujukan Hukum Terkait Migrasi Di Mesir	
Tahun	Hukum
2014	Egyptian Constitution of January 2014
2010	Decree of President 204/2010 (<i>Security in the border of the Arab Republic of Egypt</i>)
2010	Law n° 64 of 2010 (<i>Regarding Combating Human Trafficking</i>)
2005	Law n° 88 of 5 May 2005 (<i>Entry, Residence, and Exit of Foreigners</i>)
2004	Law n° 154 of 14 July 2004 amending Law n° 26 of 29 May 1975 (<i>concerning Egyptian nationality</i>)
2003	Labour code of 7 April 2003
2003	Minister of Manpower Decree 136 of 2003 (<i>work of foreigners</i>)
1983	Law n° 111 of 1983 (<i>Law on Emigration and Egyptians Welfare Abroad</i>)

Sumber: Migration Policy Centre⁹¹

Hukum dan beberapa dekrit diatas memiliki poin-poin yang berhubungan dengan migrasi di Mesir. Egyptian Constitution of January 2014, merupakan konstitusi baru di Mesir yang mana telah mengamandemen konstitusi sebelumnya yakni konstitusi 2012. Pada konstitusi Mesir tahun 2014 ini sedikit mencantumkan kembali terkait hak dan kebebasan warga negara maupun non

⁹¹ Migration Policy Center, 2013, "Migration Profile of Egypt", (RSCAS European University Institute).

warga negara dalam bergerak dan bermigrasi “*Freedom of Movement*”. Peraturan atau Dekrit Presiden Mesir 204/2010, menekankan terkait keamanan pada setiap perbatasan yang ada di Mesir yang menjadi perlintasan migrasi warga asing kedalam Mesir. Law n° 64 of 2010, menekankan terkait memerangi perdagangan manusia. Law n° 88 of 5 May 2005, memaparkan terkait aturan-aturan dalam aktifitas migrasi (masuk-tinggal-keluar) di Mesir. Law n° 154 of 14 July 2004, memaparkan terkait perlindungan terhadap warga negara Mesir di luar Mesir. Law Labour code of 7 April 2003, memaparkan terkait tenaga kerja Mesir diluar Mesir. Minister of Manpower Decree 136 of 2003, memaparkan terkait pekerjaan tenaga kerja asing di Mesir. 1983 Law n° 111 of 1983, memaparkan terkait keimigrasian, dan undang-undang ini telah di amandemen dalam Law n° 88 of 5 May 2005 (Entry, Residence, and Exit of Foreigners).

Dari semua hukum yang berkaitan dengan Migrasi diatas, ada salah satu hukum yang memiliki hubungan erat dengan fenomena terkait tugas skripsi yang penulis angkat tentang “Kebijakan Migrasi Mesir Terkait Penutupan Terowongan Rafah”. Hukum tersebut adalah Law of Entry, Residence, and Exit of Foreigners n° 88 of 5 May 2005.

Kebijakan migrasi Mesir dalam penutupan terowongan Rafah, salah satunya memiliki landasan hukum yang jelas dimana kebijakan tersebut berpijak pada Law of Entry, Residence, and Exit of Foreigners 2005. Terowongan Rafah yang menghubungkan Gaza dan Mesir menjadi penyebab dari munculnya para imigran gelap Gaza di Mesir. Karena terowongan Rafah merupakan jalur rahasia bagi para imigran gelap Gaza yang pergi ke Mesir. Illegal Migrant atau imigran

gelap adalah seorang warga negara asing yang masuk ke negara lain tanpa melalui prosedur dan aturan yang sah dari negara yang menjadi tujuannya.⁹² Dengan menggunakan terowongan Rafah sebagai jalur untuk menuju Mesir, hal itu membuat para imigran masuk ke Mesir tanpa menggunakan persyaratan yang sah dari migrasi Mesir, pasalnya terowongan tidak di kontrol oleh pihak migrasi Mesir. Oleh karena itu hal demikian menjadi suatu pelanggaran terhadap hukum yang ada di Mesir. Pasalnya Mesir memiliki aturan dan hukum yang jelas terkait persyaratan masuk Mesir , seperti dokumen/paspor menjadi persyaratan untuk menuju ke Mesir, hal ini tertera pada pasal 2 Law of Entry, Residence, and Exit of Foreigners 2005, yang berbunyi “Melarang warga negara dan non-warga negara keluar-masuk Mesir tanpa menggunakan dokumen/paspor yang sah secara hukum”.

Pasal diatas menunjukkan bahwa Mesir melarang setiap orang yang masuk atau keluar Mesir tanpa menggunakan dokumen yang sah. Ketika para imigran Gaza masuk ke Mesir tanpa menggunakan dokumen yang sah hal tersebut menjadi suatu pelanggaran, terlebih masuknya para imigran Gaza tanpa persyaratan yang resmi dari migrasi Mesir, itu bisa menjadi suatu ancaman tersendiri bagi Mesir. Karena banyak permasalahan yang timbul dari adanya imigran yang tidak memiliki dokumen yang sah. Aktifitas penyeludupan merupakan salah satu permasalahan yang sering dibuat oleh para imigran gelap Gaza di Mesir, selain itu keamanan perbatasan menjadi masalah lainnya yang timbul di Mesir akibat adanya para imigran gelap Gaza yang tidak memiliki dokumen/paspor yang sah. Dalam

⁹² International Organization for Migration, *Loc. Cit.*

hal ini Mesir memberlakukan undang-undang diatas, karena Mesir mencoba untuk menjaga keamanan Mesir dari segala ancaman-ancaman yang datang.

Termasuk terkait jalur masuk dan keluar Mesir, bahwa Mesir telah menetapkan Gerbang Rafah sebagai pintu masuk dan Keluar Mesir bagi para imigran Gaza. Namun imigran Gaza lebih memilih terowongan Rafah sebagai jalur masuk dan keluar Mesir. Tercatat sepanjang tahun 2013 bahwa ada sekitar 40.000 orang Gaza yang memakai terowongan Rafah sebagai akses ke Mesir.⁹³ Hal ini kembali menimbulkan adanya pelanggaran terhadap hukum tentang migrasi di Mesir. Sebagaimana tercantum pada pasal 3 dari undang-undang Law of Entry, Residence, and Exit of Foreigners 2005, yang berbunyi “Melarang para migran masuk dan keluar Mesir melalui setiap titik selain dari titik yang ditunjuk sebagai titik resmi penyeberangan perbatasan”.

Pasal diatas menjadi suatu bentuk proses pencegahan dari terjadinya “*illegal entry*”, migrasi pemerintah Mesir berusaha untuk mengontrol pergerakan keluar masuk nya para imigran di kawasan perlintasan perbatasan Mesir. Seperti pada kasu di perbatasan Rafah, migrasi Mesir telah menentukan gerbang Rafah sebagai titik pintu masuk keluar Mesir, selain dari titik pintu tersebut bukan merupakan jalur yang sah, termasuk terowongan Rafah sebagai jalur para imigran gelap gaza menuju Mesir.

Pasal 2 dan 3 diatas memiliki keterikatan dengan pasal 42 dari Law of Entry, Residence and ext Foreginer, dimana pelanggaran yang dibuat oleh para imigran Gaza terkait masuk-keluar Mesir tanpa dokumen yang sah dan tanpa

⁹³ BBC, Life in the Gaza Strip, www.bbc.com/news/world-middle-east-20415675, Diakses pada tanggal 5 Maret 2015, Pukul 13.35 WIB.

melalui jalur yang resmi, hal tersebut memunculkan tindakan hukuman dari migrasi pemerintah Mesir terhadap imigran Gaza, seperti yang tercantum pada pasal 42 yang berbunyi “Warga negara asing yang melanggar pasal 2 dan 3 dapat menghadapi hukuman pidana dan/atau denda yang mencakup penjara sampai enam bulan dan/atau denda sampai 1000 pound Mesir dan hukuman di deportasi dari negara”.

Dalam pengambilan tindakan hukum dari pelanggaran migrasi yang ada, Migrasi pemerintah Mesir memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penegakan hukum atas munculnya pelanggaran-pelanggaran terkait keimigrasian tersebut. Karena kewenangan yang dimiliki Migrasi pemerintah Mesir dalam melakukan tindakan hukum, itu menjadi tugas dan perintah dari hukum yang ada pada pasal 31 Law of Entry, Residence and Exit Foreigners 2005, berbunyi “Seorang warga negara asing dapat dikeluarkan dengan perintah deportasi oleh Pihak Keimigrasian jika warga negara asing tersebut memasuki negara dengan cara illegal”.

Namun tidak hanya pihak keimigrasian Mesir saja yang memiliki peran dalam proses keamanan migrasi pada kawasan perlintasan perbatasan Rafah. Pihak keamanan yang didalamnya merupakan militer maupun polisi ikut memiliki peran juga dalam proses keamanan migrasi pada kawasan perbatasan Rafah. Tugas dan wewenang ini ada pada Dekrit Presiden tahun 2010, yang berbunyi “Pada kawasan perbatasan negara yang menjadi zona keamanan militer seperti di Semenanjung Sinai. Pihak keamanan Mesir dapat menangkap orang-orang yang masuk dan keluar Mesir secara tidak sah”.

Dikrit tersebut menunjukkan bahwa keamanan migrasi di kawasan perbatasan Mesir khususnya di kawasan perbatasan Rafah menjadi titik fokus dalam penjagaan keamanan terkait pelanggaran-pelanggran migrasi yang sering terjadi. Imigran gelap menjadi subyek dari permasalahan kewanaman di kawasan perbatasan diatas. Disini Pemerintah Mesir berusaha untuk membendung segala ancaman yang memungkinkan masuk ke Mesir akibat dari adanya arus para imigran gelap Gaza yang keluar-masuk Mesir melalui Terowongan Rafah.

Pemaparan dan hukum-hukum yang ada diatas akan penulis kerucutkan dengan kebijakan migrasi pemerintah Mesir beserta pihak keamanan Mesir dalam menutup terowongan Rafah. Bahwa hukum-hukum diatas menjadi suatu acuan dan pijakan bagi migrasi pemerintah Mesir beserta pihak keamanan Mesir dalam menutup terowongan Rafah.

Terowongan Rafah yang menghubungkan Jalur Gaza dengan Mesir, merupakan jalur rahasia bagi para imigran Gaza dan pemerintahan Jalur Gaza yang dipegang oleh Hamas untuk menuju Mesir maupun menuju Gaza. Banyak dari para penduduk Gaza dan pihak Hamas yang menjadikan terowongan Rafah sebagai akses perjalanan maupun akses penyeludupan barang yang dibutuhkan oleh penduduk Gaza.

Penggunaan terowongan Rafah oleh para imigran Gaza dan Hamas sebagai jalur menuju Mesir berikut dengan segala aktifitas yang ada di jalur tersebut termasuk penyeludupan barang-barang merupakan suatu pelanggaran bagi hukum migrasi pemerintahan Mesir. Pasalnya terowongan Rafah bukan merupakan jalur resmi yang di kontrol oleh pihak migrasi Mesir, melainkan

Gerbang Rafah lah yang menjadi pintu dan jalur resmi menuju Mesir yang di kontrol oleh pihak migrasi Mesir.

Adanya terowongan bawah tanah Rafah disini menjadi sebuah akar permasalahan bagi migrasi pemerintah Mesir terkait keamanan migrasi kawasan perbatasan. Pasalnya dengan adanya terowongan bawah tanah tersebut, memberikan peluang dan kesempatan bagi penduduk Gaza untuk keluar masuk Mesir secara tidak resmi "*illegal entry*". Oleh karena itu untuk membendung terjadinya keluar masuk secara ilegal, membendung arus imigran gelap, membendung aktifitas penyeludupan khususnya penyeludupan senjata dan menjaga stabilitas keamanan perbatasan Rafah maka migrasi pemerintah Mesir dan pihak keamanan Mesir melakukan penutupan dan penghancuran terhadap terowongan Rafah. Semua ini merupakan suatu bentuk dari pengamanan migrasi atau sekuritisasi migrasi di kawasan perbatasan Rafah yang menghubungkan antara Jalur Gaza dan Mesir.

Terlihat bahwa indikator hukum memiliki peran penting dalam sekuritisasi migrasi. Dimana hukum menjadi pijakan dan acuan bagi migrasi pemerintah Mesir dibawah kepemimpinan Al-sisi dalam menutup dan menghancurkan terowongan bawah tanah Rafah.

Begitupun pada masa Husni Mubarak dan Muhammad Mursy, Hukum Law of Entry, Residence and Exit Foreigner menjadi pijakan dan acuan dari pemerintah Mesir dalam kedua masa tersebut dalam masalah keimigrasian. Meskipun kebijakan yang dikeluarkan berbeda pada setiap masanya.

2. Kebijakan Pemerintah (*Policy Statement Indicator*)

Migrasi saat ini telah masuk kedalam permasalahan keamanan di Mesir. Pasalnya aktifitas yang berkaitan dengan migrasi Mesir sering menimbulkan suatu permasalahan yang berhubungan dengan keamanan di kawasan perbatasan Mesir, dimana permasalahan tersebut menjadi suatu ancaman bagi keamanan negara. Munculnya kasus illegal migration yang menimbulkan adanya imigran gelap, kemudian kasus penyeludupan senjata hingga kasus terorisme transnasional yang menimbulkan keamanan pada kawasan Mesir menjadi tidak stabil merupakan bagian dari permasalahan yang ada pada keamanan migrasi Mesir. Sehingga migrasi di Mesir saat ini telah menjadi bagian dari elemen kunci keamanan negara Mesir.

Masuknya permasalahan migrasi kedalam poros keamanan Mesir, membuat pemerintah Mesir memiliki kebijakan tersendiri dalam menangani permasalahan yang ada khususnya dalam menangani permasalahan migrasi yang menimbulkan keamanan di Mesir tidak stabil. Kebijakan pemerintah Mesir tentunya memiliki hubungan dengan isu migrasi, keamanan dan hubungan luar negeri itu sendiri. Kebijakan yang dibuat pun memiliki tujuan untuk memecahkan permasalahan pada migrasi Mesir yang menimbulkan keamanan negara Mesir menjadi tidak stabil. Oleh karena itu kebijakan suatu negara menjadi indicator kedua yang memiliki peran penting dalam sekuritisasi migrasi.

Dari masa Kepemimpinan Mesir dibawah Husni Mubarak kemudian Mursi dan sekarang dibawah kepemimpinan Al-sisi, Mesir memiliki berbagai kebijakan tentang isu migrasi, namun kebijakan migrasi pemerintah Mesir dari

masa ke masa secara umum bertujuan untuk memenuhi lima tujuan utama:⁹⁴ Memerangi *illegal migration*, Mendorong emigrasi untuk memastikan keseimbangan dalam pasar tenaga kerja domestic, Memaksimalkan keuntungan ekonomi dari migrasi, Menjamin kesejahteraan emigrant, Memenuhi permintaan tenaga kerja dari negara-negara penerima.

Poin-poin diatas merupakan tujuan kebijakan migrasi pemerintah Mesir secara umum. Namun ada satu poin yang memiliki hubungan yang erat dengan permasalahan keamanan migrasi Mesir, yakni poin pertama terkait *memerangi illegal migration*. Permasalahan *illegal migration* memang menjadi permasalahan serius pada keamanan migrasi pemerintah Mesir. Pasalnya *illegal migration* yang ada menimbulkan ancaman-ancaman masuk kedalam Mesir, dari mulai status para imigran yang menjadi imigran gelap, kemudian aktifitas para imigran yang terkadang menjadi ancaman bagi keamanan Mesir seperti aktifitas penyeludupan senjata, terlebih penyeludupan yang ada pun menjadi kerugian bagi pemerintah Mesir, hingga ancaman terorisme transnational yang berada pada kawasan perbatasan Rafah di semenanjung Sinai. Fenomena terowongan bawah tanah Rafah dikawasan perbatasan Mesir dan Jalur Gaza menjadi bukti dari adanya *illegal migration* itu sendiri, dimana terowongan bawah tanah Rafah menjadi jalur rahasia bagi para penduduk Gaza untuk keluar-masuk Mesir, karna memang terowongan rafah tersebut tidak dikendalikan oleh migrasi dan keamanan Mesir, melainkan di kendalikan dan di kontrol oleh Hamas sebagai pemerintah yang memimpin di Jalur Gaza. Oleh karena itu ancaman-ancaman yang timbul dari

⁹⁴ Ayman Zohry. *Loc. Cit.*

adanya illegal migration, membuat pemerintah Mesir memiliki tujuan untuk memerangi dan membendung illegal migration.

Kebijakan migrasi pemerintah Mesir untuk memerangi masalah *illegal migration* pun dibuat dan dilaksanakan sedemikian rupa. Pada tahun 2007 pemerintah Mesir dibawah kepemimpinan Husni Mubarak mengeluarkan kebijakan *Shoot-To-Stop*, kebijakan ini sempat berjalan meskipun banyak hal yang kontradiktif dengan kebijakan tersebut.⁹⁵ Kemudian pada masa Muhammad Mursi, pemerintah Mesir mengeluarkan kebijakan yang berbeda dengan sebelumnya, dimana Muhammad Muri mengeluarkan kebijakan tentang pengaktifan kembali gerbang Rafah sebagai pintu perlintasan Gaza – Mesir. Selanjutnya pada tahun 2014 dibawah kepemimpinan Al-sisi, pemerintah Mesir mengeluarkan kebijakan *Keamanan Perbatasan*.⁹⁶

Sebelum pemaparan lebih jauh terkait pemaparan dua kebijakan diatas. Perlu diketahui bahwa berhubungan dengan kebijakan keamanan migrasi pemerintah Mesir, ini tidak dapat dipisahkan dari departemen-departemen di pemerintahan Mesir yang secara umum memiliki peran tersendiri dan ikut andil dalam pendampingan dan pencapaian tujuan kebijakan tentang keamanan migrasi itu sendiri. Beberapa departemen atau kementerian tersebut seperti:⁹⁷

a. *The Higher Committee for Migration (Komisi Tinggi untuk Migrasi)*

The Higher Committee for Migration (HCM) dibentuk dengan dasar resolusi perdana menteri no 2000 tahun 1997. Pembentukan komisi ini dipimpin

⁹⁵ Amnesty International MDE, “Deadly Journeys Through the Desert”, (Desember, 2008), hlm. 3.

⁹⁶ The Conversation, General Sisi fights on all fronts to secure Egypt’s borders, <http://theconversation.com/general-sisi-fights-on-all-fronts-to-secure-egypts-borders-37718>, Diakses pada tanggal 14 Maret 2015, pukul 16.00 WIB.

⁹⁷ Ayman Zohry. *Op. Cit.* hlm. 35.

oleh kementerian tenaga kerja dan migrasi, keanggotaan komisi ini tergabung dari berbagai departemen atau lembaga pemerintahan di Mesir yang memiliki kaitan dengan migrasi. Komisi ini memiliki kapasitas untuk concern terhadap permasalahan migrasi di Mesir.

b. *Ministry of Manpower and Emigration (Kementrian Tenaga Kerja dan Emigrasi)*

Kementrian Tenaga Kerja dan Emigrasi pada awalnya merupakan kementerian emigrasi saja yang dibentuk dengan dasar Keputusan Presiden Nomor 574 pada tahun 1981. Namun berubah dari kementerian emigrasi menjadi kementerian tenaga kerja dan emigrasi, perubahan ini berpacu pada Keputusan Presiden Nomor 165 tahun 1996. Kementrian Tenaga Kerja dan Emigrasi memiliki kapasitas yang berfokus pada pengembangan dimensi ketenaga kerjaan warga Mesir di luar negeri.

c. *Ministry of Foreign Affair (Kementrian Luar Negeri)*

Kementrian Luar Negeri ini merupakan kementerian yang menjadi refresentasi Mesir di negara lain. Dimana kementerian luar negeri memiliki kapasitas untuk mengurus berbagai hal yang berhubungan dengan luar negeri, baik mengenai pelayanan migrasi, pelayanan perlindungan hukum bagi warga negara Mesir yang berada di negara lain, kerjasama pemerintahan, kerjasama keamanan, penyampaian dan pemberian sikap tentang kebijakan negara Mesir terhadap negara lain, dll.

d. *Ministry of Interior (Kementerian Dalam Negeri)*

Kementerian Dalam Negeri merupakan kementerian yang concern terhadap pengawasan di dalam negara Mesir. Kementerian Dalam Negeri memiliki wewenang terkait pemberian izin terhadap warga negara Mesir yang hendak bermigrasi ke negara lain. Kementerian Dalam Negeri memiliki kontrol dalam migrasi dari/ke Mesir dan memiliki wewenang untuk mengatur tempat tinggal warga negara asing di Mesir. Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan kementerian lain seperti Luar Negeri, Pendidikan, dan Tenaga Kerja untuk mengawasi migrasi yang ada. Sehubungan dengan illegal migration, Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan semua organisasi dan instansi terkait untuk mengurangi illegal migration dari/ke/melalui Mesir.

e. *Ministry of Defense (Kementerian Pertahanan / Militer)*

Kementerian ini dalam Pemerintah Mesir memiliki kapasitas untuk membidangi urusan pertahanan. Kementerian pertahanan bertugas untuk mengatur, mengelola, memfasilitasi, mengembangkan dan memelihara urusan angkatan bersenjata Mesir dan yang paling utama kementerian pertahanan ini memiliki tugas untuk menjaga keamanan negara Mesir dari segala ancaman yang datang, baik ancaman dari dalam negeri maupun ancaman dari luar negeri. Ketika ada ancaman dari luar negeri yang mengancam keamanan Mesir khususnya di kawasan perbatasan, maka Kementerian pertahanan menjadi gardu depan dalam proses pengamanan tersebut.

Lima departemen diatas merupakan departemen yang secara garis besar memiliki peran dan andil terhadap kebijakan pemerintah Mesir terkait isu

keamana Migrasi. Di mana masing-masing departemen tersebut memiliki fungsi masing dalam isu ke imigrasian di Mesir.

Kembali lagi kepada kebijakan yang pernah dibuat dan dilakukan sedemikian rupa oleh pemerintah Mesir terkait keamanan migrasi. Pertama terkait kebijakan *Shoot-To-Stop* yang dikeluarkan pada tahun 2007 dibawah Husni Mubarak. Kebijakan ini dibuat pada dasarnya untuk mengatasi permasalahan *illegal migration* yang sering terjadi di kawasan perbatasan Rafah semenanjung Sinai. Namun kebijakan ini pun tidak terlepas dari intervensi asing terhadap Mesir, dimana ada intervensi asing yang mempengaruhi pengambilan kebijakan *Shoot-To-Stop* tersebut agar diambil oleh Mesir. Pihak yang melakukan intervensi tersebut adalah Israel, dimana Mesir pada saat itu mendapat tekanan kuat secara politik dari Israel untuk menghentikan berbagai kasus *illegal migration* dan khususnya kasus penyeludupan senjata yang sering terjadi di kawasan Sinai perbatasan Rafah yang menghubungkan Gaza dan Mesir.⁹⁸

Sepanjang tahun 2007-2010, tercatat bahwa ada 85 imigran yang tewas di kawasan Sinai perbatasan Rafah.⁹⁹ Tewasnya para imigran tersebut karena akibat dari adanya kebijakan *Shoot-To-Stop*. Dimana militer Mesir sebagai bagian dari Kementerian Pertahanan Mesir yang memiliki tugas untuk menjaga keamanan di kawasan perbatasan Mesir bertindak dalam melakukan penembakan terhadap para pelaku dari *illegal migration* yang ketahuan keluar-masuk Mesir melalui terowongan Rafah sebagai jalur tidak sah bagi Pemerintahan Mesir.

⁹⁸ Amnesty International, *Lok. Cit.*

⁹⁹ UN: Egypt to Chair Refugee Agency's Governing, *Human Rights Watch*, (United States of America), 2010.

Kebijakan itu berjalan dengan kerjasama yang terjalin antara beberapa kementerian yang ada di pemerintahan Mesir. Seperti HCM melakukan pencarian dan pendataan terkait berbagai pelanggaran yang ditimbulkan dari adanya illegal migration. Kementerian tenaga kerja dan Migrasi melakukan pengetatan terhadap jalur dan gerbang Rafah sebagai perlintasan Mesir-Gaza. Kementerian luar negeri memberikan pernyataan sikap terhadap Gaza sebagai pemasok dari para imigran gelap. Kemudian tentunya kementerian Pertahanan dengan para Militer nya yang melakukan penjagaan keamanan dan eksekusi terkait kebijakan *Shoot-To-Stop* di kawasan Sinai perbatasan Rafah sebagai jalur illegal migration.

Mesir telah banyak dikecam oleh Dunia Internasional karena menerapkan kebijakan Shoot-To-Stop, akhirnya kebijakan Shoot-To-Stop di Mesir tidak lama berjalan,¹⁰⁰ pasalnya banyak hal yang kontradiktif dengan kebijakan tersebut. Terutama terkait hak asasi manusia untuk hidup yang secara sewenang-wenang direbut oleh adanya kebijakan Shoot-To-Stop. Disisi lainnya Husni Mubarak pun mengeluarkan kebijakan juga terkait penghancuran Terowongan Rafah dan pemblokadean terhadap gerbang Rafah dalam isu permasalahan Migrasi.

Kemudian kedua kebijakan pemerintah Mesir yang berbeda dari kedua masa yang ada, yakni kebijakan pembukaan gerbang Rafah dibawah kepemimpinan Muhammad Mursi tahun 2012. Dimana Muhammad Mursi melakukan pengaktifan kembali gerbang Rafah sebagai jalur perlintasan Gaza – Mesir. Ketika kebijakan tersebut dikeluarkan, hal itu membuat aktifitas

¹⁰⁰ Global Detention Project, Egypt Detention Profile 2014, <http://www.globaldetentionproject.org/countries/africa/egypt/introduction.html>, Diakses pada tanggal 11 Maret 2015, Pukul 09.15 WIB.

terowongan Rafah menjadi menurun, karena gerbang Rafah yang menjadi pintu perlintasan dari Gaza – Mesir telah dapat untuk dipergunakan lagi oleh penduduk Gaza.

Kemudian terakhir terkait kebijakan *Keamanan Perbatasan* yang mulai di maksimalkan pada tahun 2014 dibawah kepemimpinan Al-sisi. Disini Al-sisi sebagai Presiden Mesir berkomitmen untuk mengamankan perbatasan Mesir.¹⁰¹ Kebijakan ini diambil dengan landasan keamanan di kawasan perbatasan yang selalu memunculkan illegal migration juga. Illegal migration sendiri seperti yang telah dijelaskan di bab- bab sebelumnya, bahwa adanya illegal migration menimbulkan ancaman-ancaman masuk kedalam Mesir, dari mulai status para imigran yang menjadi imigran gelap, kemudian aktifitas para imigran yang terkadang menjadi ancaman bagi keamanan Mesir seperti aktifitas penyeludupan senjata, hingga ancaman terorisme transnational yang berada pada kawasan perbatasan Rafah di semenanjung Sinai. Kemudian pengambilan kebijakan Keamanan Perbatasan ini ditambah juga dengan alasan kondisi Mesir yang saat itu masih berada dalam pembangunan dan perbaikan paska terjadinya dua kali revolusi di Mesir, khususnya paska terjadinya kudeta militer terhadap Muhammad Mursi. Oleh karena itu pemerintah Mesir memberlakukan kebijakan keamanan perbatasan.

Kebijakan Keamanan Perbatasan sendiri terimplementasikan dalam beberapa tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Mesir. Seperti tindakan penangkapan dan penahanan terhadap para pelaku ilegal migration yang diketahui

¹⁰¹ The Conversation, General Sisi fights on all fronts to secure Egypt's borders, <http://theconversation.com/general-sisi-fights-on-all-fronts-to-secure-egypts-borders-37718>, Diakses pada tanggal 14 Maret 2015, pukul 16.00 WIB.

keluar masuk melalui terowongan Rafah sebagai jalur ilegal di kawasan perbatasan. Kemudian proyek pembangunan zona penyangga di sepanjang jalur perbatasan Mesir-Jalur Gaza juga merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Mesir dalam melakukan kebijakan keamanan perbatasan. Hingga pada tindakan penghancuran terowongan bawah tanah Rafah telah dilakukan oleh pemerintah Mesir sebagai pelaksanaan kebijakan keamanan perbatasan.

Kebijakan Keamanan Perbatasan pun berjalan dengan kerjasama yang terjalin antara beberapa departemen yang ada di pemerintahan Mesir. HCM dengan Kementerian tenaga kerja dan Migrasi dan Militer melakukan pengetatan terhadap gerbang Rafah sebagai jalur perlintasan Mesir-Gaza, juga melakukan tindakan terkait pembangunan zona penyangga dan penghancuran terowongan bawah tanah Rafah Menteri Pertahanan Mesir tahun 2014 yakni Sedki Sobhi menekankan bahwa tidak ada kompromi dengan keamanan perbatasan, mengamankan perbatasan Mesir dan melindungi keamanan nasional adalah misi suci.¹⁰² Kementerian luar negeri Mesir sebagai departemen yang mengurus hubungan luar negeri pun melakukan pernyataan sikap dan informasi terhadap pemerintah di Jalur Gaza. Menteri Luar Negeri Mesir periode 2013-2014 yakni Nabil Fahmy, mengatakan bahwa negaranya harus bekerja keras untuk mengamankan perbatasan dengan Jalur Gaza, yang dikendalikan oleh Hamas.¹⁰³ Begitupun Sameh Shoukry Menteri Luar Negeri Mesir tahun 2014, mengatakan

¹⁰² Daily News Egypt, Border security is a 'sacred mission' Defence minister, www.dailynewsegypt.com/2014/08/17/border-security-sacred-mission-defence-minister/, Diakses pada tanggal 11 Maret 2015, pukul 13.00 WIB.

¹⁰³ Sindo News, Mesir Berupaya Keras Amankan Perbatasan Dengan Jalur Gaza, <http://international.sindonews.com/read/775700/44/mesir-berupaya-keras-amankan-perbatasan-dengan-jalur-gaza-1377533478>, Diakses pada tanggal 25 Januari 2015, Pukul 10.15 WIB .

bahwa kawasan perbatasan Rafah adalah kedaulatan Mesir, Hamas tidak bisa berbuat sewenang-wenang di kawasan yang menjadi wilayah dari Mesir.¹⁰⁴ Kementerian Dalam Negeri pun bekerjasama dengan HCM dan Militer dalam melakukan proses penangkapan, penahanan hingga pendeportasian terhadap para imigran yang diketahui sebagai pelaku illegal migration.

Sikap dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Mesir, dalam memerangi illegal migration yang menjadi permasalahan dalam keamanan migrasi Mesir dikawasan perbatasan Rafah, merupakan bentuk dari proses pengamanan. Maka Terlihat bahwa kebijakan terkait keamanan migrasi pemerintah Mesir menjadi idikator yang penting dalam melakukan sekuritisasi migrasi di kawasan perbatasan Rafah.

3. Saliency Indicator

Saliency dalam hal ini terkait seberapa kuat dan seberapa terintegrasi nya migrasi dengan keamanan dalam kebijakan suatu negara. Melihat terintegrasinya migrasi dan kemanan dalam kebijakan suatu negara, bisa dilihat ketika permasalahan migrasi sudah menjadi *toplist security concern* dari keamanan suatu negara, sehingga negara menjadikan isu permasalahan migrasi dan keamanan kedalam salah satu kebijakan negara yang di prioritaskan. Ketika kebijakan suatu negara telah memasukan isu migrasi dan keamanan kedalam salah satu kebijakan negara yang diprioritaskan, maka saliency pada negara tersebut sangat tinggi, dalam hal ini migrasi dan kemanan telah terintegrasikan secara baik dalam kebijakan suatu negara tersebut.

¹⁰⁴ HLS News Wire, srael Launches Ground War Against Hamas Egypt Blames Hamas, dalam <http://www.homelandsecuritynewswire.com/bull20140717-israel-launches-ground-war-against-hamas-egypt-blames-hamas>, diakses pada tanggal 26 Januari 2015, Pukul 09.20 WIB.

Menghubungkan dengan negara Mesir yang merupakan negara yang memiliki perbatasan secara langsung dengan Jalur Gaza, perbatasan tersebut berada di kawasan Rafah. Migrasi Mesir memiliki kontrol terhadap gerbang Rafah yang merupakan pintu masuk Gaza dan Mesir, namun migrasi Mesir memiliki kewaspadaan lain terkait isu keamanan di kawasan perbatasan. Dimana pada kawasan Rafah yang menjadi perbatasan antara Gaza dan Mesir terdapat banyak jalur rahasia untuk masuk ke Gaza ataupun Mesir. Jalur rahasia tersebut yakni terowongan-terowongan bawah tanah yang menjulang dari Gaza ke Mesir. Jalur rahasia atau terowongan tersebut yang menjadi ancaman keamanan migrasi di Mesir.

Keberadaan terowongan bawah tanah Rafah menimbulkan kegelisahan bagi pemerintahan Mesir, dimana keamanan migrasi Mesir merasakan ada berbagai ancaman dari adanya terowongan Rafah di sepanjang perbatasan Rafah tersebut. Ancaman keamanan tersebut menimbulkan adanya ketidak stabilan pada keamanan Mesir khususnya di kawasan Rafah dan semenanjung Sinai sebagai kawasan yang berbatasan langsung antara Mesir dan Jalur Gaza. Banyak penduduk Gaza yang menggunakan Terowongan Rafah sebagai akses dan jalur rahasia untuk keluar-masuk Mesir. Masuk nya para imigran dan penduduk dari Gaza ke Mesir melalui terowongan tersebut, membuat masuknya pula masalah serta ancaman yang ditimbulkan oleh para imigran, seperti Ancaman dari munculnya para imigran gelap, ancaman karena adanya berbagai aktifitas penyeludupan, hingga terorisme di kawasan perbatasan.

Imigran gelap Gaza menjadi suatu ancaman tersendiri bagi Mesir. Pasalnya banyak permasalahan yang timbul karena adanya imigran gelap. Penyeludupan merupakan salah satu permasalahan yang sering dibuat oleh para imigran gelap Gaza di Mesir, selain itu keamanan perbatasan menjadi masalah lainnya yang timbul di Mesir akibat adanya para imigran gelap dari Gaza.

Terkait penyeludupan, bahwa sering terjadi aktifitas penyeludupan dikawasan perbatasan Rafah yang keluar masuk melalui terowongan Rafah. Satu hal yang menjadi ancaman bagi Mesir dari aktifitas penyeludupan ini adalah adanya penyeludupan senjata yang dilakukan oleh militan Hamas sebagai pemerintah yang berkuasa di Jalur Gaza. Persenjataan ini sangat dibutuhkan oleh Hamas untuk menjaga stabilitas keamanan di Jalur Gaza, yang mana jalur Gaza sering mendapatkan serangan dari Israel. Penyeludupan senjata bukan menjadi hal baru di Gaza, karena memang terowongan ini dibuat pada awalnya adalah sebagai jalur untuk penyeludupan senjata.

Kemudian terkait terorisme di kawasan perbatasan, terorisme menjadi sorotan utama pemerintah Mesir dari adanya terowongan bawah tanah Rafah. Pasalnya sering terjadi konflik yang menyebabkan tewas nya beberapa orang dari petugas migrasi Mesir dan petugas keamanan Mesir itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan di kawasan Rafah khususnya di sepanjang perbatasan Mesir dan Gaza belum stabil. Pemerintah Mesir meyakini bahwa konflik yang sering terjadi di kawasan perbatasan Rafah, memiliki hubungan dengan keberadaannya beberapa terowongan Rafah di kawasan tersebut.

Ancaman-ancaman diatas yang merupakan bagian dari isu permasalahan migrasi di Mesir telah menjadi *Toplist security concern* dari keamanan Mesir.

Karena memang ancaman-ancaman yang ada menjadi permasalahan bagi keamanan negara. Ketika hal tersebut menjadi ancaman bagi keamanan negara, maka pemerintah Mesir menjadikan isu permasalahan migrasi dan keamanan kedalam salah satu kebijakan negara yang di prioritaskan, terbukti dengan adanya kebijakan *Kemanan Perbatasan* pada tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Presiden Al-sisi. Kebijakan itu pun dikeluarkan kembali lagi atas dasar kekhawatiran pemerintah Mesir terhadap ancaman-ancaman yang mengganggu keamanan negara Mesir.

Ketika sudah menjadi prioritas dari kebijakan negara, maka Mesir akan melakukan tindakan keamanan apapun untuk membendung dan mencegah masuknya ancaman ke Mesir, hingga tindakan penghancuran terowongan Rafah pun dilakukan. Tindakan keamanan yang dilakukan pun dengan tetap berpijak pada hukum yang ada. Disini terlihat bahwa saliency di Mesir sangat tinggi, karena migrasi dan keamanan telah terintegrasikan kedalam suatu kebijakan negara yang sangat di prioritaskan.

Hal ini menunjukkan bahwa penghancuran terowongan bawah tanah Rafah di masa Al-sisi merupakan bagian dari tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah Mesir. Karena kebijakan keamanan perbatasan Pemerintah Mesir di era Al-sisi telah menjadi prioritas dari kebijakan negara Mesir untuk mencegah dan membendung ancaman yang datang dari adanya terowongan tersebut. Sehingga kebijakan tersebut menjadi pendorong untuk pemerintah Mesir dibawah Al-sisi dalam melakukan penghancuran terowongan bawah tanah Rafah.

Berbeda dengan masa Husni Mubarak, dimana kebijakan penghancuran terowongan Rafah tidak terlalu menjadi prioritas disini, meskipun ada tindakan penghancuran juga yang dilakukan oleh pemerintah Husni Mubarak terhadap terowongan tersebut. Namun pada masa Husni Mubarak kebijakan dalam memblokade gerbang Rafah merupakan salah satu kebijakan yang sangat di prioritaskan. Kemudian jauh berbeda lagi dengan kepemimpinan dibawah Muhammad Mursy, kebijakan terkait penghancuran terowongan rafah sama sekali bukan menjadi prioritas dari kebijakan pemerintah Mesir di masa itu. Hal ini terlihat dengan kebijakan pemerintah Mesir pada masa Mursi yang mengeluarkan kebijakan terkait pembukaan dan pengaktifan kembali gerbang Rafah sebagai pintu perlintasan Gaza-Mesir.

B. Kategori Peraktek Keamanan (*Security Practice Category*)

Peraktek keamanan merupakan bagian dari proses sekuritisasi migrasi yang ada pada suatu negara. Peraktek keamanan adalah tindakan yang harus dilakukan suatu negara dalam menjalankan sekuritisasi migrasi. Dalam hal ini bahwa perlu ada tindakan-tindakan yang kongkrit dalam membangun sekuritisasi migrasi pada suatu negara. Karena untuk mencapai keamanan pada migrasi suatu negara, tidak hanya dengan mengandalkan pada hukum atau kebijakan negara saja, namun turut diikuti dengan peraktek keamanan. Dalam sekuritisasi migrasi ada dua praktek atau pelaksanaan keamanan yang sangat relevan, yakni sebuah praktek pencegahan dan pelaksanaan penahanan terhadap para pelaku illegal migration.

1. Pencegahan (*Interdiction Indicator*)

Praktek pencegahan sebagai salah satu praktek pelaksanaan keamanan dalam proses sekuritisasi migrasi tercatat telah banyak dilakukan di Mesir. Dalam fenomena permasalahan keamanan migrasi di Mesir, praktek pencegahan telah dilakukan dari sejak lama, baik pada masa kepemimpinan Huni Mubarak, Muhammad Mursi dan pada saat kepemimpinan saat ini yang berada dibawah kendali Presiden Al-sisi. Setiap kebijakan terkait keamanan migrasi yang dikeluarkan oleh pemerintah mesir, maka akan berujung pada suatu tindakan keamanan yang berupaya untuk mencegah masuknya masalah yang ditimbulkan oleh adanya *illegal migration*.

Praktek pencegahan yang merupakan bagian dari seperangkat praktek yang berusaha untuk menghentikan aliran imigran dengan melarang, mencegah atau mengalihkan dan membendung para imigran yang ingin masuk kedalam Mesir secara tidak sah melalui jalur terowongan Rafah. Secara garis besar bahwa praktek pencegahan atau pembendungan terhadap jalur terowongan Rafah ini dilakukan untuk mencegah masuknya ancaman yang mengancam stabilitas keamanan di dalam negara Mesir.

Meskipun disisi lain adanya praktek pencegahan terhadap terowongan Rafah, menjadi suatu pukulan besar bagi penduduk Gaza. Pasalnya terowongan Rafah telah menjadi sumber kehidupan bagi penduduk Gaza. Semua kebutuhan yang dibutuhkan penduduk Gaza masuk melalui terowongan tersebut, seperti kebutuhan mendasar makanan, pangan, material, obat-obatan dan yang lain-lain juga ikut masuk melalui terowongan tersebut. Namun bagi Mesir adanya

terowongan bawah tanah Rafah merupakan ancaman bagi keamanan Mesir. Pasalnya terowongan tersebut tidak berada pada kontrol Mesir, akan tetapi berada dibawah kontrol Hamas sebagai pemerintah di Jalur Gaza. Hamas pun terkadang menyeludupkan senjata dan amunisi lainnya untuk persenjataan Hamas melalui terowongan bawah tanah tersebut. Terkadang terowongan bawah tanah Rafah tersebut pun menjadi akses dan tempat berlindung dari para terorisme yang terkadang mengancam kewanaman Mesir. Hal itu menjadi kekhawatiran pemerintah Mesir ketika tidak ada praktek pencegahan terhadap semua aktifitas penyeludupan yang ada.

Oleh karena itu Pemerintah Mesir melakukan praktek pencegahan dalam pelaksanaan keamanan yang bertujuan untuk melakukan sekuritisasi migrasi di kawasan perbatasan Mesir. Pemerintah Mesir dibawah kendali Presiden Al-sisi mengerahkan serangkaian langkah-langkah sebagai reaksi terhadap berbagai ancaman yang mengancam keamanan Mesir, langkah-langkahnya sebagai berikut:¹⁰⁵ *Pertama*, Menutup dan melakukan pengetatan terhadap Gerbang Rafah , yang merupakan perbatasan antara Mesir dan Jalur Gaza. *Kedua*, Membangun Zona penyangga di kawasan Rafah, yang membatasi Mesir dan jalur Gaza. *Ketiga*, Melakukan penghancuran terowongan-terowongan bawah tanah Rafah, yang digunakan oleh Hamas untuk berbagai penyeludupan dan akses bagi imigran Gaza untuk keluar-masuk Mesir.

Pada masa Al-sisi, penutupan dan pengetatan gerbang Rafah sebagai bentuk praktek pencegahan dari pelaksanaan kewanaman migrasi Mesir itu ditandai

¹⁰⁵ Yoni Ben Menachem, "Egyptian President al-Sisi vs. Hamas", *Institute for Contemporary Affairs*, Volume XIV (2014).

saat awal tergulingnya Mursi dari kursi Presiden. Dimana pada tanggal 3 juli hingga 28 Juli 2013 setidaknya ada 50 pihak keamanan Mesir yang tewas di kawasan semenanjung Sinai, akibat serangan yang dilakukan oleh kelompok teroris yang berada di kawasan utara Sinai.¹⁰⁶ Hal ini menimbulkan keamanan di kawasan perbatasan antara Mesir dan Jalur Gaza tidak stabil. Insiden penyerangan di wilayah perbatasan tersebut, berdampak pada hubungan Mesir dan Jalur Gaza. Oleh karena itu pemerintah Mesir saat itu yang dikendalikan oleh militer kembali menutup perbatasan Rafah sampai batas waktu yang tidak ditentukan, dengan alasan terjadinya penyerangan terhadap pihak keamanan Mesir di kawasan perbatasan dan pelakunya diduga dari militan Hamas.¹⁰⁷ Penutupan dan pengetatan gerbang Rafah berlanjut hingga tahun 2014 karena seiring masih adanya permasalahan-permasalahan yang timbul, meskipun terkadang juga ada beberapa hari yang mana gerbang tersebut dibuka untuk perlintasan, namun penggunaannya sangat terbatas.

Kemudian praktek pencegahan dalam bentuk pembangunan Zona penyangga yang memisahkan Rafah-Gaza dengan Rafah-Mesir dan yang menjadi penghalang dari adanya terowongan bawah tanah Rafah. Zona penyangga ini yang berada pada sepanjang perbatasan Mesir –Gaza, yang memiliki panjang sekitar 14 km. Zona penyangga yang menjadi penghalang terowongan bawah tanah Rafah pada awalnya telah dibangun di masa Husni Mubarak, namun pada masa Al-sisi terjadi perluasan dalam pembangunan zona penyangga ini.

¹⁰⁶ ABC, Egyptian policemen killed in Sinai attack: reports, <http://www.abc.net.au/news/2013-08-19/at-least-24-egypt-police-killed-in-sinai-attack/4897630>, Diakses pada tanggal 4 Maret 2015, pukul 22.00 WIB.

¹⁰⁷ BBC, Gaza: Hamas urges Egypt to reopen Rafah crossing, <http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-23809332>, diakses pada tanggal 4 Maret 2015, pukul 11.00 WIB.

Perluasan Zona penyangga ini ditandai dengan keadaan darurat dikawasan Sinai perbatasan Rafah. Dimana pada bulan oktober 2014 telah terjadi serangan bom bunuh diri yang menewaskan 30 tentara dan puluhan lainnya luka-luka dalam serangan di kawasan utara Sinai Perbatasan Rafah.¹⁰⁸ Pemboman itu dilakukan oleh tersangka jihad yang menabrakan mobil ke arah pos pemeriksaan dengan kendaraan yang dikemas bahan peledak.

Mesir pun saat itu mengumumkan keadaan darurat di kawasan semenanjung Sinai perbatasan Rafah. Untuk proyek perluasan pembangunan zona penyangga tersebut, Mesir mengosongkan wilayah-wilayah pemukiman warga. Dimana pihak keamanan Mesir menginformasikan kepada seluruh warga yang berada di kawasan tersebut untuk segera meninggalkan rumahnya dalam waktu 48 jam, sekitar 800 rumah telah di robohkan untuk perluasan zona penyangga.¹⁰⁹

Kemudian praktek pencegahan lainnya adalah penghancuran terowongan bawah tanah Rafah yang menjadi akses bagi para imigran Gaza untuk keluar-masuk Mesir dan menjadi akses Hamas dalam melakukan berbagai penyeludupan. Penghancuran terowongan bawah tanah Rafah beberapa telah dilakukan sejak dulu ketika masih di masa Husni Mubarak. Namun keberadaan terowongan pun tidak sedikit dan sulit untuk ditemukan. Hal tersebut yang membuat terowongan bawah tanah Rafah masih ada menjulang dari Gaza ke Mesir. Pada dasarnya penghancuran terowongan bawah tanah Rafah dilakukan sebagai bentuk tindakan

¹⁰⁸ Lisa Watanabe, *Op. Cit.* hlm.3.

¹⁰⁹ *Ibid.* hlm. 4.

untuk mencegah dan membendung arus imigran gelap, penyeludupan, dan terorisme di kawasan semanjung Sinai perbatasan Rafah.¹¹⁰

Pada tahun 2013, Mesir melakukan penutupan terowongan bawah tanah Rafah dengan cara membanjiri terowongan bawah tanah dengan air dan limbah.¹¹¹ Sehingga terowongan tidak dapat digunakan sebagai akses perjalanan ataupun penyeludupan. Sepanjang tahun 2013 hingga 2014 dibawah kendali Al-sisi, tercatat bahwa Mesir telah menghancurkan sekitar 1.659 terowongan bawah tanah Rafah yang menjadi jalur rahasia dari Gaza ke Mesir.¹¹²

Beberapa tindakan dari praktek pencegahan dalam pelaksanaan keamanan diatas, menunjukkan bahwa pencegahan yang dilakukan oleh Mesir dibawah Presiden Al-sisi memiliki tujuan untuk membendung dan mencegah masuknya ancaman-ancaman yang datang dari adanya terowongan bawah tanah Rafah tersebut. Terlihat bahwa praktek pencegahan ini menjadi bagian dari proses sekuritisasi migrasi di Mesir.

Kemudian praktek pencegahan terhadap ancaman yang datang ke Mesir pada masa Husni Mubarak pun ada dan ikut dilakukan, seperti pemblokadean gerbang rafah dan penghancuran terowongan rafah. Namun pada penghancuran terowongan Rafah tidak semaksimal dengan apa yang dilakukan pada masa Al-sisi. Berbeda lagi dengan masanya Muhammad Mursi, dimana Mesir sama sekali

¹¹⁰ Lichtenwald Terrance, Frank S. Perri, "Terrorist Use of Smuggling Tunnels", *International Journal of Criminology and Sociology*, Volume II (2013).

¹¹¹ New York Times, To Block Gaza Tunnels, Egypt Lets Sewage Flow, www.nytimes.com/2013/02/21/world/middleeast/egypts-floods-smuggling-tunnels-to-gaza-with-sewage.html?_r=1, Diakses pada tanggal 25 Februari 2015, Pukul 14.00 WIB.

¹¹² Times of Israel, Egyptian army destroys 13 more Gaza tunnels: Cairo has eliminated 1,639 tunnels that run into Sinai thus far, www.timesofisrael.com/egyptian-army-destroys-13-more-gaza-tunnels/, Diakses pada tanggal 15 Februari 2015, Pukul 21.30 WIB.

tidak melakukan praktek pencegahan. Namun sebaliknya, mursi melakukan praktek yang memudahkan warga Gaza, yakni pembukaan gerbang Rafah sebagai akses bagi warga Gaza menuju Mesir dan dunia luar.

2. Penahanan (*Detention Indicator*)

Mesir telah lama menjadi negara tujuan dan persinggahan bagi sejumlah besar pencari suaka, pengungsi dan para imigran gelap, seperti Sudan, Irak, Etiopia, Somalia, dan Eritrea, serta Suriah dan Gaza. perhatian khususnya diberikan kepada para imigran yang datang dari Jalur Gaza melalui terowongan bawah tanah Rafah. Merespon fenomena ini, Mesir memberlakukan berbagai cara untuk membendung fenomena imigran gelap. Seperti tindakan diatas, dimana Mesir melakukan pengetatan pada gerbang Rafah, melakukan pembangunan zona penyangga, melakukan penghancuran terhadap terowongan-terowongan dan melakukan tindakan penahanan terhadap para pelaku illegal migration.

Penahanan sebagai bentuk praktek keamanan kedua dalam proses membangun sekuritisasi migrasi. Penahan ini ditujukan terhadap para imigran yang diketahui keluar-masuk Mesir secara tidak resmi, dalam hal ini secara illegal. Penahanan ini pun ditujukan kepada mereka yang diketahui melakukan penyeludupan di kawasan perbatasan Rafah. Penahanan dalam kasus keamanan migrasi di Mesir, tetap berpijak pada hukum yang ada. Tentunya penahanan ini dilakukan dengan tujuan, agar menjaga satabilitas keamanan di kawasan perbatasan Rafah, dan terlebih untuk menjadikan hal ini sebagai efek jera bagi para pelaku illegal migration agar tidak lagi masuk ke Mesir secara tidak sah.

Migrasi pemerintahan Mesir bekerjasama dengan Keamanan Mesir yang berada dibawah kendali militer, telah melakukan penangkapan terhadap berbagai imigran gelap yang masuk melalui terowongan Rafah. Termasuk berbagai imigran yang melakukan penyeludupan melalui terowongan tersebut. Banyak dari mereka yang melakukan penyeludupan yang membahayakan keamanan di wilayah perbatasan Mesir, seperti penyeludupan senjata dan roket. Militer Mesir pun melakukan penangkapan dan penahanan terhadap para imigran gelap yang diduga sering melakukan penyerangan terhadap penjaga perbatasan Mesir di wilayah semanjung Sinai.

Ketentuan hukum yang relevan dengan penahanan terkait isu migrasi ada pada konstitusi Mesir tahun 2014 dan Law of Entry, Residence, and Exit Foreigner. Melarang warga negara dan non-warga negara keluar-masuk Mesir tanpa menggunakan dokumen/paspor yang sah secara hukum (Pasal 2). Melarang para migran masuk dan keluar Mesir melalui setiap titik selain dari titik yang ditunjuk sebagai titik resmi penyeberangan perbatasan (Pasal 3). Warga negara asing yang melanggar pasal 2 dan 3 dapat menghadapi hukuman pidana dan/atau denda yang mencakup penjara sampai enam bulan dan/atau denda sampai 1000 pound Mesir dan hukuman deportasi (Pasal 42).

Tiga pasal diatas menunjukkan bahwa ada bentuk pelarangan yang dibuat oleh pemerintah Mesir terkait fenomena migrasi secara ilegal. Kemudian pemerintah Mesir melalui departemen migrasi dan keamanannya memiliki wewenang untuk melakukan penangkapan, penahanan hingga pendeportasian terhadap para pelaku dari illegal migration.

Namun penahanan yang dilakukan oleh pemerintah Mesir pun tetap melihat sisi kemanusiaan, dimana Pemerintah Mesir memberikan jaminan-jaminan terhadap para tahanan. Seperti tercantum di konstitusi Mesir 2014 yang menyatakan beberapa jaminan yang relevan dengan situasi tahanan non-warga negara, termasuk hak untuk menentang penahanan (Pasal 54), hak untuk dilindungi dari penyiksaan dan penganiayaan (Pasal 55), dan penyediaan pengawasan yudisial atas semua tempat penahanan (Pasal 56). Non-warga negara yang dituduh melakukan kejahatan yang berasal dari status imigrasi mereka (Imigran gelap) harus dipertimbangkan tidak bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan hukum (Pasal 96).

Pada masa Husni Mubarak, bentuk praktek penahanan ikut dihadirkan begitupun pada masa Muhammad Mursi. Namun tidak semaksimal pada masa al-sisi, yang kepemimpinannya baru berusia sangat dini. Dari pertengahan tahun 2013 hingga 2014, pihak keamanan Mesir melaporkan telah menahan lebih dari 6.800 orang yang masuk ke Mesir secara tidak resmi "*Illegal Entry*" dari Suriah dan Gaza.¹¹³ Kemudian sepanjang 2014 tercatat sekitar 130 orang telah tertangkap di kawasan perbatasan Mesir-Jalur Gaza.¹¹⁴ Penangkapan dan penahan yang dilakukan di Mesir dalam proses pelaksanaan keamanan ini merupakan bentuk dari proses sekuritisasi migrasi di Mesir.

¹¹³ Peter Beaumont, Patrick Kingsley, 2014, "Devil and the deep blue sea: how Mediterranean migrant disaster unfolded", (Paper diterbitkan, The Guardian).

¹¹⁴ Beacon, Egyptian army shoot dead Syrian migrant, wound Palestinian-Eyewitnesses, <https://www.beaconreader.com/tomrollins/egyptian-army-shoot-dead-syrian-migrant-wound-palestinian-eyewitnesses>, Diakses Pada tanggal 12 Maret 2015, Pukul 13.25 WIB.